

**POTENSI PERMODALAN, PEMETAAN DAN SKIM PEMBIAYAAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Oleh :

Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si.

Dr. Abd. Kadir, SE., M.Si., Ak.

Meina Wulansari Yusniar, SE., M.Si.

Doni Stiadi, S.Si., M.Si.

Ahmad Rifani, SE., M.M.



**Lambung Mangkurat University Press
2016**

**POTENSI PERMODALAN, PEMETAAN DAN SKIM PEMBIAYAAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Oleh :

Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si.
Dr. Abd. Kadir, SE., M.Si., Ak.
Meina Wulansari Yusniar, SE., M.Si.
Doni Stiadi, S.Si., M.Si.
Ahmad Rifani, SE., M.M.

Editor : Nasruddin, S.Pd., M.Sc

Diterbitkan oleh:

Lambung Mangkurat University Press, 2016
d/a Pusat Pengelolaan Jurnal dan Penerbitan Unlam
Jl. H. Hasan Basry, Kayu Tangi, Banjarmasin 70123
Gedung Rektorat Unlam Lt 2
Telp/Faks. 0511-3305195

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang.

Dilarang memperbanyak Buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan cara apa pun, baik secara mekanik maupun elektronik, termasuk fotocopi, rekaman dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit

IV- 128 h 15,5 x 23 cm
Cetakan pertama, September 2016

ISBN : 978-602-9092-93-6

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim Peneliti mampu merampungkan seluruh rangkaian kegiatan penelitian Tahun 2009 yang diwujudkan dalam bentuk buku yang hingga saat ini telah sampai ditangan anda.

Terwujudnya buku hasil penelitian ini tidak terlepas dari dukungan penuh Pemerintah Daerah kabupaten Kotabaru terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Kotabaru, demikian pula halnya dengan Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat, Instansi Dinas terkait di Kabupaten Kotabaru termasuk para Camat, para Kepala Desa dan seluruh masyarakat kabupaten Kotabaru khususnya para pelaku usaha UMKM yang secara keseluruhan telah memberikan dukungan positif dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Berkenan dengan hal tersebut di atas, maka pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru, demikian pula Kepala Bappeda Kabupaten Kotabaru beserta seluruh jajarannya dan bahkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan penelitian ini, semoga seluruh bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada kami mendapatkan limpahan pahala dari Allah SWT, Amin Ya Rabbal Alamin.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami segenap Tim Peneliti dari Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, menaruh harapan besar agar kiranya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan pembangunan terutama dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Kotabaru. UMKM maju rakyat Bumi Saijaan sejahtera.

Banjarmasin, Desember, 2011

Penyusun,

Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri., SE., M.Si.
NIP: 19673112 199512 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN DIAGNOSIS AWAL UMKM DI KABUPATEN KOTABARU.....	10
2.1. Beberapa Tinjauan Teoritis.....	10
2.1.1 Masalah Pengembangan dan Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Indonesia.....	11
2.1.2 Karakteristik Umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.....	14
2.1.3 Pengelompokan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	16
2.1.4 Permasalahan Utama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.....	18
2.1.5 Kebijakan Pengembangan UMKM di Indonesia	24
2.1.6 Perbandingan Masalah Skema Pembiayaan UMKM di Indonesia dengan Negara Lainnya.....	26
2.1.7 Penelitian yang Sudah Ada	39
2.2. Beberapa Hasil Diagnosis Awal Kondisi UMKM Di Kabupaten Kotabaru	48
2.3. Beberapa Identifikasi dari Diagnosis Awal	51
BAB IV POTENSI PERMODALAN, PEMETAAN, SKIM PEMBIAYAAN UMKM DI KABUPATEN KOTABARU	58
4.1. Profil UMKM Kotabaru.....	64
4.2. Manajemen Pengelolaan UMKM di Kabupaten Kotabaru	70
4.3. Kondisi Permodalan UMKM & Koperasi di Kabupaten Kotabaru	81
4.4. Akses Penguatan Permodalan UMKM di Kabupaten Kotabaru	84
4.5. Pemanfaatan Modal Pinjaman Usaha UMKM di Kabupaten Kotabaru	89
4.6. Hambatan Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan UMKM di Kabupaten Kotabaru.....	91
4.7. Kinerja Usaha UMKM di Kabupaten Kotabaru	93
4.8. Harapan Pelaku Usaha UMKM terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru	102
4.9. Kemitraan CSR suatu Alternatif Penguatan UMKM	105
4.10. Implikasi Penelitian.....	108
BAB V KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN.....	121
5.1. Kesimpulan	121
5.2. Saran	122
5.3. Rekomendasi Kebijakan	124
DAFTAR PUSTAKA	128

BAB I

PENDAHULUAN

Setelah krisis ekonomi dan pemulihan berjalan, beberapa studi telah menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tidak hanya mengandalkan peranan usaha besar, dan UMKM terbukti mempunyai ketahanan relatif lebih baik dibandingkan usaha dengan skala lebih besar. Tidak mengherankan bahwa baik pada masa krisis dan masa pemulihan perekonomian Indonesia saat ini, UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting ditinjau dari berbagai aspek. *Pertama*, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. *Kedua*, potensinya yang besar dalam menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha dengan skala lebih besar. *Ketiga*, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan. *Keempat*, memiliki sumbangan kepada devisa negara dengan nilai ekspor yang cukup stabil.

Secara makro UMKM merupakan populasi usaha jumlahnya UMKM 44,69 juta atau 99,9% dari unit usaha nasional (BPS,2005), dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 77,67 juta atau 96,2% dari tenaga kerja nasional (Sanim,2009), sumbangan terhadap mencapai 53,28% dari PDB nasional (BPS,2007), sumbangan terhadap nilai ekspor Rp 109,12 triliun atau 19,2% dari ekspor nasional, dan sumbangan terhadap nilai investasi Rp 275,37 triliun (45,9%) dari investasi nasional (BPS, 2005). Dengan demikian usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sekali lagi sangat berperan dalam perekonomian nasional.

Kondisi tersebut di atas merupakan salah satu alasan yang sangat kuat untuk menjadikan koperasi dan UMKM sebagai sumber kekuatan dalam pembangunan ekonomi yang berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan. Fokus perhatian dalam pembinaan koperasi dan UMKM melalui penguatan permodalan merupakan salah satu bentuk keberpihakan pihak pemerintah terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan yang dapat dibanggakan dan tidak hanya menjadi komoditas politik bagi kalangan tertentu. Oleh karena itu, membangun koperasi dan UMKM melalui penguatan permodalan dapat diartikan sebagai penjelmaan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk merealisasikan impian rakyat kecil yang pada umumnya bergelut dalam UMKM.

Namun demikian, perlu disadari bahwa koperasi dan UMKM pada sisi yang lain sangat membutuhkan berbagai kebijakan terutama dari pemerintah agar UMKM tersebut benar-benar merupakan tonggak bagi pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Berbagai studi sebelumnya (Yunus, 1997, 2001, dan 2003) telah menunjukkan bahwa koperasi UMKM memiliki permasalahan yang sangat kompleks dimana dapat mencakup: bidang kebijakan (*policy*), pengembangan dan pelayanan bisnis (*Business Support*), pembiayaan usaha (*SME-Micro finance*), infrastruktur, koordinasi program UMKM di daerah (*Coordination of SME-Micro programs in the local area*), dan integrasi serta kerjasama nasional dan regional seperti *East ASEAN Growth Area* (EAGA).

Guna menjadikan koperasi dan UMKM sebagai sumber kekuatan ekonomi yang mantap pada tataran pembangunan ekonomi regional pada suatu wilayah provinsi atau kabupaten maka berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari berbagai *stakeholders* terutama pihak pemerintah daerah. Mengingat kondisi obyektif tersebut maka salah satu daerah yang memiliki potensi pengembangan

koperasi dan UMKM yang sangat besar adalah Kabupaten Kota Baru di Provinsi Kalimantan Selatan dengan berbagai kegiatan usahanya. Kondisi UKM di Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2006 diklasifikasikan menurut kategori dan skala usaha, yang rinciannya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel: 1.1. Banyaknya Perusahaan/Usaha Menurut Kategori dan Skala Usaha di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006

Kabupaten/ Kota	Usaha Besar	Usaha Menengah	Usaha Kecil	Usaha Mikro	Tidak Dapat diklasifikasikan	Jumlah
Tanah Laut	32	97	4.305	22.598	16	27.048
Kotabaru	26	129	3.023	18.340	43	21.561
Banjar	70	210	9.716	43.882	59	53.937
Barito	12	75	2.406	27.101	2	29.596
Kuala	18	38	2.086	12.654	3	14.799
Tapin	28	115	4.082	19.901	1	24.127
HSS ^{*)}	19	147	3.999	24.484	5	28.654
HST ^{*)}	31	157	4.351	33.397	12	37.948
HSU ^{*)}	12	58	3.536	16.907	10	20.523
Tabalong	42	152	3.532	21.040	8	24.774
Tanbu	5	33	1.287	9.851	-	11.176
Balangan	298	819	17.607	65.874	27	84.625
Banjarmasin	35	157	2.985	13.080	34	16.291
Banjarbaru						
Jumlah	628	2.187	62.915	329.109	220	395.059

Sumber: Sensus Ekonomi 2006 BPS Kalsel, 2008

Keterangan *):HSS = Hulu Sungai Selatan, HST = Hulu Sungai Tengah, HSU = Hulu Sungai Utara

Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah usaha kecil menengah di Kabupaten Kota Baru sampai dengan tahun 2006 sebanyak 21.492 unit atau sebesar 99,68% dari 21.561 jumlah usaha/industri yang ada di Kabupaten Kota Baru. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha kecil menengah (UKM) merupakan usaha mayoritas masyarakat Kota Baru dibandingkan dengan usaha berskala

besar yang berjumlah 26 unit atau hanya sebesar 0,13%. Fenomena tersebut semakin mempertegas bahwa UKM mempunyai peranan yang besar dalam menopang kehidupan masyarakat, khususnya di kabupaten Kota Baru. Sedangkan 43 unit atau sebesar 0,20% merupakan jenis usaha yang tidak dapat diklasifikasikan.

Pengembangan UMKM di kabupaten Kota Baru dalam perkembangannya menghadapi permasalahan kompleks seperti yang telah diuraikan sebelumnya antara lain; *Pertama*, Aspek manajemen pengembangan usaha yang masih sangat tradisional dan cenderung dianggap sebagai usaha sampingan bagi sebagian besar masyarakat. *Kedua*, Aspek keterbatasan permodalan dalam pengembangan usaha, *Ketiga*, Aspek skala produksi yang belum mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektifitas usaha, *Keempat*, Aspek pemanfaatan teknologi, *Kelima*, Aspek ketersediaan bahan baku, *Keenam*, Aspek pemasaran dan pengepakan, *Ketujuh*, Aspek kualitas produksi, *Kedelapan*, Aspek keterbatasan sumberdaya manusia.

Survey dari BPS mengidentifikasi berbagai kelemahan dan permasalahan yang dihadapi UMKM berdasarkan prioritasnya, yakni meliputi: (i) kurangnya permodalan, (ii) kesulitan dalam pemasaran, (iii) persaingan usaha yang ketat, (iv) kesulitan bahan baku, (v) kurang teknis produksi dan keahlian, (vi) kurangnya keterampilan manajerial (SDM) dan (vii) kurangnya pengetahuan dalam masalah manajemen termasuk dalam keuangan dan akuntansi. Selain itu, UMKM juga membutuhkan adanya iklim usaha yang kondusif seperti adanya kemudahan dalam hal perijinan, perundangan yang memadai dan kondisi makro ekonomi yang stabil.

Hasil kajian tersebut mengindikasikan bahwa salah satu faktor dominan dalam pengembangan UMKM adalah faktor permodalan, meskipun bukan yang paling menentukan dalam pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Menurut Direktur Jasa Keuangan dan Analisis Moneter Bappenas Sidqi L.P. Suyitno sumber pendanaan di berbagai program pembiayaan UMKM, pemerintah masih bergantung kepada APBN, dan kurang melibatkan pembiayaan swasta/masyarakat. Jika dilihat dari sisi perbankan/lembaga pembiayaan, Sidqi memandang juga terdapat permasalahan bagi UMKM, yaitu sulitnya bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) memperoleh debitur dan sektor yang potensial karena keterbatasan informasi. Kesulitan persyaratan agunan yang memberatkan UMKM sehingga meskipun potensial tetapi dinilai tidak layak memperoleh pembiayaan dari bank. Namun Sidqi mengakui, kendala tersebut juga tidak lepas dari UMKM sendiri, dimana rendahnya kemampuan aksesibilitas mereka kepada lembaga perbankan dan LKNB, kapasitas manajerial (SDM) yang belum memadai, serta biaya biaya transaksi yang masih tinggi sehingga meningkatkan resiko usaha.

Untuk itu diperlukan peranan dari sektor perbankan maupun lembaga keuangan lainnya seperti pegadaian, modal ventura, leasing, perusahaan swasta dan dana APBD dalam penyediaan permodalan bagi UMKM. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa kredit bank masih merupakan salah satu alternatif sumber permodalan bagi UMKM. Ironisnya, justru hingga saat ini UMKM merupakan salah satu sektor yang dianggap belum layak mendapatkan akses perbankan.

Terhadap banyaknya keluhan UMKM terkait dengan sulitnya mendapatkan permodalan dari perbankan, secara umum, permasalahan yang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Beberapa Tinjauan Teoritis

UMKM memiliki permasalahan yang sangat kompleks dan dapat mencakup berbagai bidang antara lain: bidang kebijakan (*policy*), pengembangan dan pelayanan bisnis (*Business Support*), pembiayaan usaha (*SME-Micro finance*), infrastruktur, koordinasi program UMKM di daerah (*Coordination of SME-Micro programs in the local area*), dan integrasi serta kerjasama nasional dan regional seperti *East ASEAN Growth Area* (Tambunan, 2002; Yunus, 2003; dan Untoro, 2004). Beberapa aspek kajian teoritis pun telah dilakukan seperti antara lain: aspek pengembangan manajemen dan faktor penentu pertumbuhan UKM (Maupa, 2004). Namun, kajian teoritis maupun empiris atas UMKM yang terkait dengan aspek pembiayaan tetap merupakan salah satu area yang paling menarik (Robinson, 2004; dan Untoro, 2004).

Kajian teoritis tentang default risk dan pola penjaminan kredit UKM merupakan salah satu area kajian yang menantang (Coleshaw, 1989; Eales, 1997; Navajas, 2001; dan Untoro, 2004) di samping kajian tentang indikator optimal atau tingkat kejenuhan penyaluran kredit bagi UMKM baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan. Pembiayaan UMKM paling tidak harus memiliki lima prinsip, yaitu kesederhanaan, keterbukaan, kemudahan akses, cost recovery, dan kesinambungan (Biro Kredit Bank Indonesia, 2002).

Kemudian, munculnya masalah kredit perbankan dapat terjadi karena lemahnya permintaan kredit, lemahnya penawaran kredit atau keduanya (Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, 2001).

Gangguan pada sisi permintaan dapat berupa menurunnya kualitas nasabah kredit, tingginya suku bunga di atas kemampuan membayar nasabah, dan tingginya resiko berusaha. Gangguan pada sisi penawaran dapat berupa keterbatasan permodalan bank, masalah ketersediaan loanable fund, permasalahan nonperforming loans (NPLs) bank, dan keengganan bank menyalurkan kredit akibat tingginya resiko dunia usaha.

Salah satu indikator tingginya resiko dunia usaha, menurut perspektif perbankan, adalah lebarnya spread antara suku bunga kredit dan suku bunga dana akibat besarnya komponen margin resiko yang ditetapkan bank dalam suku bunga kredit (Untoro, 2004). Tingkat resiko dunia usaha yang tinggi akan mendorong bank meminta jaminan yang likuid, bank cenderung hanya berhubungan dengan debitur lama, dan bank lebih sentralistik dalam pemutusan akad kredit. Masalahnya sekarang apakah benar UMKM di Sulsel selalu menghadapi resiko usaha yang tinggi dan apakah masalah penyaluran kredit UMKM terletak pada aspek sisi permintaan, sisi penawaran atau keduanya.

2.1.1. Masalah Pengembangan dan Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Indonesia

Selama kurun waktu tahun 1970 sampai tahun 1980 perhatian pemerintah hanya ditujukan pada perkembangan usaha kecil. Usaha menengah belum mendapat perhatian penuh disebabkan karena pemerintah hanya menganggap usaha kecil sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja, mengatasi kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi pedesaan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya dalam memasuki era perdagangan bebas antar negara ASEAN (AFTA) dan memasuki persaingan

global, produk-produk nasional terpaksa harus bersaing dengan produk-produk dari negara tetangga dan dunia. Pemerintah pun akhirnya menyadari bahwa di Indonesia jumlah Usaha Besar tidak banyak sedangkan jumlah Usaha Kecil sangat banyak, tetapi tidak ada Usaha Menengah dalam jumlah besar dan kuat yang dapat berfungsi sebagai penghubung antara Usaha Kecil dengan Usaha Besar. Hal inilah kemudian menyebabkan Usaha Menengah mendapat perhatian penuh pemerintah.

Dalam upaya pengembangan UMKM di Indonesia tampak masih terdapat masalah tentang definisi seperti adanya akronim UKM dan atau SMEs serta lainnya (Tambunan, 2002; Yunus, 2003; dan Untoro, 2004). Definisi usaha kecil-menengah suatu negara berbeda dengan negara lainnya, namun dalam definisi tersebut mencakup sedikitnya dua aspek yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek besarnya aset yang dimiliki. Di dalam UU No.9 tahun 1995 ditetapkan bahwa usaha kecil adalah suatu unit usaha yang memiliki aset netto (tidak termasuk tanah dan bangunan) yang tidak melebihi Rp.200 juta, atau penjualan pertahun tidak lebih dari satu milyar rupiah. Sedangkan dalam Inpres No. 10 tahun 1999 disebutkan bahwa usaha menengah adalah suatu unit usaha yang memiliki nilai aset netto (tidak termasuk tanah dan bangunan) antara Rp.200 juta hingga sepuluh milyar rupiah.

Kemudian menurut BPS (1998), industri kecil adalah unit usaha dengan jumlah pekerja paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan belas orang termasuk pengusaha. Industri menengah dan besar adalah unit usaha yang mempekerjakan lebih dari dua puluh orang pekerja. Berdasarkan undang-undang no.9 tahun 1995 tentang usaha kecil dan BPS di atas dapat diketahui kriteria dari Usaha Kecil, yaitu: (1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah,

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak satu milyar rupiah. (3) Milik warga negara Indonesia. (4) Mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit sembilan orang dan paling banyak 19 orang termasuk pengusaha. (5) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. (6) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Sementara berdasarkan Inpres no. 10 tahun 1999 tentang usaha menengah dan BPS dapat diketahui kriteria dari usaha menengah yaitu sebagai berikut : (1) Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta rupiah dan paling banyak 10 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (2) Milik warga negara Indonesia (3) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari satu milyar rupiah tetapi kurang dari 50 milyar rupiah. (4) Mempekerjakan tenaga kerja lebih dari dua puluh orang. (5) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar. (6) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum.

2.1.2. Karakteristik Umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia

Karakteristik umum usaha kecil dan menengah di Indonesia adalah sama dengan kondisi UMKM pada negara-negara berkembang pada umumnya. Karakteristik yang dimiliki dapat menjadi kekuatan dan kelemahan dalam perkembangannya atau sebagai dasar kebijakan-kebijakan yang diambil oleh

pemerintah dalam memberdayakan UMKM. Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan dari usaha kecil dan menengah dikemukakan oleh Tambunan (2002) dalam Tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1. Faktor-Faktor Kekuatan dan Kelemahan UMKM

Faktor-faktor	Kekuatan	Kelemahan
1. Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Motivasi yang kuat untuk mempertahankan usahanya • Tenaga kerja yang melimpah dan upah rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas SDM utamanya pendidikan formal rendah • Kemampuan melihat peluang bisnis terbatas • Produktivitas rendah • Etos kerja dan disiplin kerja rendah • Penggunaan tenaga kerja cenderung <i>exploitative</i> dengan tujuan untuk mengejar target • Sering mengandalkan anggota keluarga sebagai pekerja tidak dibayar
2. Ekonomi (Bisnis)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengandalkan sumber-sumber keuangan informal yang mudah diperoleh • Mengandalkan bahan baku lokal sesuai dengan jenis produk • Melayani segmen pasar bawah yang tinggi permintaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kewirausahaan yang rendah • Nilai tambah yang diperoleh rendah karena akumulasi yang lambat bahkan sulit terjadi • Manajemen keuangan yang kurang bagus

Sumber: Tambunan (2002)

Kombinasi antara kekuatan dan kelemahan tersebut sangat menentukan kemampuan UMKM dalam menghadapi tantangan yang ada. Dalam perkembangannya saat ini menurut Tambunan (2002) UMKM dihadapkan pada tantangan dalam aspek:

1. Perkembangan teknologi yang pesat.

Perubahan teknologi utamanya dalam proses produksi, teknologi informasi, teknologi bahan baku sintesis, mempengaruhi dunia

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Secara geografis Kabupaten Kota Baru terletak di sisi tenggara propinsi Kabupaten Kota Baru dengan titik koordinat diantara 2 20'-4 56' Lintang Selatan dan, 115 29'-116 30' Bujur Timur sedangkan pembagian Grid Propinsi terletak antara Grid AA-CG dan 27-57 dengan titik salib sumbu grid pada koordinat UTM X = 300.000 – 550.000 dan Y = 9.455.000 – 9.750.000. Letak geografis Wilayah Kabupaten Kotabaru berbatasan dengan : (1) Utara dengan propinsi Kalimantan Timur; (2) Timur dengan selat Makassar; (3) Selatan dengan laut Jawa. (4) Barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Kondisi alam di Kabupaten Kota Baru sangat bervariasi terdiri dari perpaduan tanah pegunungan dan daerah pantai (genangan) dan daerah daratan dengan daerah perairan yang dipenuhi pulau-pulau kecil.

Kabupaten Kotabaru merupakan Kabupaten terluas di Kabupaten Kota Baru, dengan luas wilayah 9.442,46 Km-Persegi atau lebih kurang seperempat (25,21 %)luas wilayah propinsi Kabupaten Kota Baru. Kabupaten Kotabaru terbagi menjadi 20 kecamatan dan 195 kelurahan/desa. Wilayah Kabupaten Kotabaru juga terdiri dari 45 pulau besar dan kecil, yang terbesar adalah Pulau Laut, dan diantaranya ada beberapa pulau yang dapat dikategorikan sebagai pulau besar yaitu Pulau Sebuku, Pulau Kunyit, Pulau Sewangi. Dalam konteks regional, Nasional dan Internasional Kotabaru memiliki keunggulan kompetitif karena posisi yang strategis yaitu berada pada pusat persilangan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan potensial menjadi alternatif gerbang transit paling efisien dalam lalu lintas pelayaran internasional di Asia Pasifik.

Tabel: 4.1. Nama Kecamatan, Luas Wilayah dan Banyaknya Desa di Kabupaten Kotabaru

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Ibu Kota	Jumlah Desa
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pulau Sembilan	4.76	Marabatuan	5
2	Pulau Laut Barat	398.82	Lontar	21
3	Pulau Laut Selatan	378.07	Tanjung Seloka	7
4	Pulau Laut Kepulauan	107.12	Tanjung Lalak Selatan	8
5	Pulau Laut Timur	642.81	Berangas	14
6	Pulau Sebuku	225.5	Sungai Bali	8
7	Pulau Laut Utara	159.3	Kota Baru	21
8	Pulau Laut Tengah	337.64	Salino	7
9	Kelumpang Selatan	279.66	Pantai	9
10	Kelumpang Hilir	281.2	Serongga	8
11	Kelumpang Hulu	553.44	Sungai Kupang	10
12	Hampang	589.15	Hampang	7
13	Sungai Durian	1684.64	Sungai Durian	7
14	Kelumpang Tengah	1042.38	Tanjung Batu	12
15	Kelumpang Barat	349.29	Bungkukan	6
16	Kelumpang Utara	279.45	Pudi	7
17	Pamukan Selatan	391.87	Tanjung Samalantakan	11
18	Sampanahan	488.89	Gunung Batu Besar	10
19	Pamukan Utara	638.63	Bakau	13
20	Pamukan Barat	589.84	Sengayam	4
	Total	9422.46		195

Sumber : BPS Kota Baru data di olah 2009

Tabel di atas terlihat bahwa kecamatan Pulau Laut Barat dan Pulau Laut Utara memiliki jumlah desa terbanyak dengan sama-sama mencapai 10,77 % dari total jumlah desa kabupaten Kotabaru. Kecamatan Pulau Laut Timur berada pada urutan kedua dengan jumlah desa terbanyak 7,18 % dari total jumlah desa pada kabupaten Kotabaru. Kecamatan Pamuka Barat merupakan kecamatan dengan jumlah desa terkecil dibanding kecamatan lainnya, yakni hanya 2,05 % dari total jumlah desa pada kabupaten Kotabaru.

4.2. Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terhadap responden penelitian pada tujuh wilayah Kecamatan tersebut maka dapat diketahui karakteristik responden menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur, status perkawinan, pekerjaan dan tanggungan keluarga. Karakteristik responden tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi

yang lebih komprehensif terhadap para responden yang menjadi sumber informasi utama dalam penelitian ini.

Tingkat kualitas penelitian yang dihasilkan salah satunya ditentukan oleh tingkat keakuratan informasi yang diperoleh dari para responden penelitian, oleh karena itu, setiap penelitian perlu menjelaskan siapa yang menjadi responden penelitiannya dengan baik. Kondisi tersebut dapat dijelaskan menurut kelompok usaha yang terdiri dari usaha UMKM yang menjadi responden dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini. Untuk mengetahui kondisi tersebut di atas maka dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel: 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Umur dan Status Perkawinan untuk Usaha UMKM di Kotabaru

Karakteristik	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1. Jenis kelamin (n=307)		
Laki-laki	226	73.62
Perempuan	81	26.38
2. Umur (n = 307)		
≤ 25	13	4.23
26 - 30	20	6.51
31 - 35	49	15.96
36 – 40	77	25.08
41- 45	59	19.22
46 – 50	31	10.10
> 50	58	18.89
3. Status Perkawinan (n=307)		
Kawin	273	88.93
Belum kawin	22	7.17
Janda/Duda	12	3.91
Total	307	100

Sumber: Data Primer, 2009

BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1. KESIMPULAN

1. UMKM di Kabupaten Kota Baru pada umumnya mengalami kekurangan modal dalam menjalankan usahanya, meskipun secara operasional menurut masing-masing sektor dan skala usaha relatif menguntungkan secara ekonomis.
2. Efektifitas pemanfaatan permodalan bagi UMKM cukup efektif jika dilihat dari tingkat keuntungan usaha yang diperoleh dalam menjalankan usahanya.
3. Permintaan permodalan usaha oleh UMKM di Kabupaten Kotabaru pada umumnya merupakan permintaan modal kerja.
4. Akses permodalan UMKM di Kabupaten Kotabaru relatif masih terbatas yang disebabkan oleh kendala manajemen usaha dan kendala teknis dalam melakukan akses permodalan.
5. Hambatan yang dialami oleh UMKM dalam mengakses permodalan adalah kendala manajemen usaha dan kendala teknis dalam melakukan akses permodalan.
6. Model kebijakan skim perkreditan untuk penguatan permodalan bagi UMKM di Kabupaten Kotabaru, sangat membutuhkan model skim penjaminan pemda melalui APBD dan kerja sama dengan perbankan.
7. UMKM di Kabupaten Kotabaru memiliki potensi yang relatif besar dalam penyerapan tenaga kerja sehingga UMKM berperan penting

dalam menanggulangi pengangguran, terutama pada sektor industri kerajinan dan pengolahan dan sektor agribisnis.

8. UMKM di Kabupaten Kotabaru pada umumnya memiliki keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia dalam menjalankan usahanya, baik pemilik usaha UMKM maupun tenaga kerjanya.
9. Usaha UMKM di Kabupaten Kotabaru relatif belum terpetakan dengan baik berdasarkan sektor usaha dan skala usaha.
10. Usaha UMKM di Kabupaten Kotabaru secara alamiah berkelompok berdasarkan wilayah dan kegiatan usaha, sehingga memungkinkan untuk dikembangkan menjadi sentra pengembangan usaha UMKM berdasarkan sektor.

5.2. S A R A N

1. Program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kotabaru perlu dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja usahanya.
2. Program penguatan permodalan UMKM di Kabupaten Kotabaru membutuhkan skim pembiayaan yang terintegrasi dengan proses pembinaan manajemen usaha.
3. Pemberdayaan UMKM melalui penguatan permodalan sebaiknya dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan kegiatan usaha berdasarkan skala usaha dan sektor usaha.

4. Pengembangan daya saing UMKM di Kabupaten Kotabaru sangat membutuhkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui berbagai program pelatihan manajemen usaha yang lebih intensif.
5. Pembinaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Kotabaru sebaiknya didasarkan pada hasil pemetaan berdasarkan sektor dan skala usaha.
6. Pengembangan UMKM di Kabupaten Kotabaru sebaiknya memperhatikan jaringan pemasaran antar UMKM berdasarkan rantai kebutuhan aktivitas usaha.
7. Pengembangan jaringan kerjasama UMKM di Kabupaten Kotabaru sebaiknya didukung oleh forum komunikasi UMKM.
8. Konsep *risk sharing* dan penyertaan modal pemerintah daerah dalam pembiayaan UMKM dan koperasi di Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu pilihan sistem perkuatan modal yang sepatutnya dapat dipertimbangkan dalam pengembangan usaha UMKM berdasarkan kinerja manajemen yang dicapai oleh UMKM.

5.3. REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Pengembangan UMKM di Kabupaten Kotabaru perlu didukung oleh payung hukum berupa peraturan daerah (PERDA).

2. Pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru diharapkan untuk menetapkan arah kebijakannya: (a) Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*); (b) memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan; (c) memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan; (d) memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.
3. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja.
4. Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi.
5. Mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif.
6. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia.

7. Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap daerah.
8. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
9. Penumbuhan iklim usaha yang kondusif ditujukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya, termasuk akses kepada sumberdaya produktif.
10. Penumbuhan iklim usaha kondusif ini lebih banyak ditujukan dalam aspek regulasi dan deregulasi melalui penjaminan Kredit dan Peraturan yang menyangkut pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu.
11. Pengembangan lembaga keuangan mikro sebagai mitra usaha UMKM dalam menjalankan usaha di Kabupaten Kotabaru.
12. Pemberdayaan Usaha Skala Mikro yang mencakup mencakup:
 - Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perizinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan informal;
 - Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif tanpa mendistorsi pasar, seperti sistem bagi hasil dari dana bergulir, sistem tanggung

renteng, atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan;

- Penyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan yang bersumber dari berbagai instansi pusat, daerah, dan BUMN yang lebih terkoordinasi, profesional, dan institusional;
- Penyediaan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM);
- Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, serta bimbingan teknis manajemen usaha;
- Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha;
- Fasilitasi dan pemberian dukungan untuk pembentukan wadah organisasi bersama di antara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, baik dalam bentuk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya, dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha;
- Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan perajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai; dan
- Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sektor informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi pedesaan, terutama di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, Ade, dan Ahmad A. Bachri, (2000), "*Pengaruh Pembinaan Manajemen UMKM oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur (PKT) terhadap Kinerja UMKM di Kalimantan Selatan,*" Laporan Penelitian, Kerjasama LM-FEUNLAM- PT PKT Bontang: Banjarmasin
- Alfonso, D.G. (1992). *A Study of The Characteristic of Succesfull Firm black – owned Enterprises in Dade Country, Florida (Small Busines)*. Dissertation Abstracts. Florida International University, p. 49.
- Andrew, M. M. (1993), *Growth and Survival of Small Southern African Firms. (Small Firms, Swaziland, Zimbabwe, Lesotho, Botswana, Female Proprietorships)* Dissertation Abstracts, Michigan State of University, USA, p. 3302.
- Bachri, Ahmad A., Dkk (2001a), "*Evaluasi dan Monitoring Perkembangan UMKM Mitra Binaan PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Syamsuddin Noor Banjarmasin Kalimantan Selatan,*" Laporan Penelitian, Kerjasama LBIM - PT Angkasa Pura I: Banjarmasin
- , (2001b), "*Evaluasi Pembinaan dan Pengembangan UMKM berbasis Pendekatan Community Development PT. Arutmin Indonesia di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan,*" Laporan Penelitian, Kerjasama FE-UNLAM- PT Arutmin Indonesia, Banjarmasin.
- Bank Indonesia Makassar, (2005), "*Statistik Ekonomi-Keuangan Daerah Sulawesi Selatan,*" Bank Indonesia Makassar, Makassar.
- BAPPENAS, (1999), "*Menatap Kedepan Perekonomian Indonesia,*" BAPENAS: Jakarta.
- Berry, A., and B. Levy, (1994), "*Indonesia's Small and Medium Industrial Exporters and Their Support System,*" Paper Presented to the Conference 'Can Intervention Work?' The Role of Government in SME Success,' Washington DC: World Bank.
- Berry, Albert and Dipak Mazumdar (1991), "*Small-Scale Industry in the Asian-Pacific Region,*" Asian-Pacific Economic Literature 5(2):35-67.
- Biro Kredit Bank Indonesia, (2002), "*Penelitian Pola Pembiayaan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Pasca UU BI No. 23 tahun 1999,*" Laporan Penelitian, Bank Indonesia: Jakarta
- BPS, (2000), "*Statistik Industry Kecil: Small – Scale Manufacturing Industry Statistics,*" Biro Pusat Statistik: Jakarta

- BPS-Bappeda Sul-Sel, “*Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun, Berbagai Terbitan 1993-2004*, Biro Pusat Statistik Sulawesi Selatan: Makassar.
- Chun Bin, Y. (1997). *An Assessment of Management: Problem of Small Business (A Case Study of Korean Immigrant in the United States of America)*. ” Dissertation Abstracts, United States International University, p. 3135.
- Coleshaw, John, (1989), “*Credit Analysis: How to Measure and Manage Credit Risk*,” Wood head Faulkner Limited: England.
- Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, (2001), “*Credit Crunch di Indonesia Setelah Krisis*,” Bank Indonesia: Jakarta.
- Eales Rob, (1997), “*Credit Risk Measurement in Corporate Banking: Theory and Practice*,” Reserve Bank of Australia Bank, Supervision Department
- Edward M., Jr. H. (1993), *Ownership structure, Strategy, and Growth of Small Firm: an agency Perspective*. Dissertation Abstracts, UK. P. 1008.
- Greene, William H., (2003) “*Econometric Analysis*,” 5th ed., Prentice Hall: Singapore.
- Hidayat, Agus, (2006), “*Skim Pembiayaan bagi Pengembangan Pertanian dan Perikanan*,” Paper Dipresentasikan pada Seminar Regional dan Diskusi Terfokus, ISEI. Makassar.
- (2006) “*Pembangunan Pertanian dan Perikanan Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia*,” 12-13 April 2006, Hotel Sahid, Makassar.
- Iwantono, Sutrisno, (2003), “*Kiat Sukses Berwirausaha (Strategi baru Mengelola Usaha Kecil dan Menengah)*,” Grasindo: Jakarta.

DOKUMENTASI PENELITIAN

Industri pengolahan Gula Aren Tirawan



Industri Pengolahan Kerupuk Tengiri Pulau Sebuku





Budidaya rumput laut di Teluk Tamiang
Budidaya,tripang di Tanjung Seloka







Industri amplang pulau laut barat

